



ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN, KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2007-2011

Findi Risalam 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juli 2013

Disetujui Juli 2013

Dipublikasikan Agustus 2013

Keywords:

Kemandirian Fiskal,

Tingkat Kemiskinan,

Ketersediaan Infrastruktur Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi

Abstrak

Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi kedua yang memiliki rasio kemandirian fiskal antara 50% - 70% dari tahun 2007-2011. Keadaan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat tertinggi di Pulau Jawa dari tahun 2007-2011, dan pertumbuhan ekonominya juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal itu tidak diikuti dengan rasio kemandirian fiskal yang dimiliki kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah yang hanya mencapai kurang dari atau sama dengan 25%.

Hasil dari penelitian ini adalah koefisien negatif dari tingkat kemiskinan adalah -0,07 yang berarti jika tingkat kemiskinan naik 1% maka kemandirian fiskal turun 0,07%. Ketersediaan infrastruktur sekolah tidak berpengaruh secara nyata terhadap kemandirian fiskal. Koefisien positif dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25 yang berarti jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka kemandirian fiskal juga naik sebesar 0,25%. Tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur sekolah, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian fiskal .

Abstract

Real effort to measure the rate of local fiscal independence to compare the magnitude of the realization Regional Revenue with Total Regional Revenue. Province of Central Java is a second province that have fiscal independence ratio between 50%-70% of the 2007-2011. The state rate of poverty Province Central Java was ranked highest rated on the Java Island of the 2007-2011, and economic growth is still relatively low when compared to other provinces in Java Island. It was followed by fiscal independence ratio owned by regency/city in Province Central Java, which only account for less than or same as 25%.

The results from this research are the negative coefficient of the rate of poverty is -0,07, which means if the rate of poverty rise 1% then Fiscal Independence declines to 0,07%. Availability of infrastructure schools does not influence on the Fiscal Independence. Positive coefficient of economic growth of 0,25, which means that if economic growth rise 1% then the Fiscal Independence rise by 0,27%. Rate of poverty, availability of infrastructure schools, and economic growth are jointly affect the Fiscal Independence.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Kampus Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang

Telp/Fax: (024) 8508015, email: ekonomi@unnes.ac.id

ISSN 2252-6889

PENDAHULUAN

Sejak Januari 2001, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah desentralisasi atau dengan nama lain yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah atau sama halnya dengan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengurus kepentingan daerah tersebut sesuai dengan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001, pemerintah pusat memiliki peran yang dominan dalam menentukan keputusan dalam hal perekonomian daerah. Hal tersebut menciptakan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu, melalui kebijakan otonomi daerah pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri.

Tujuan pelimpahan wewenang tersebut untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan yang terjadi antar daerah di Indonesia. Namun tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tergantung dari implementasi daerah masing-masing. Selain itu desentralisasi fiskal memiliki tujuan daerah mendapat kesempatan untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mencapai kemandirian daerah. Adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi serta apa yang dibutuhkan daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan seluruh

potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana di sektor ekonomi secara lebih efektif dan efisien yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah daripada pemerintah pusat.

Rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan keadaan yang sangat baik yaitu rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Jawa Timur. Namun laju pertumbuhan ekonomi berada pada peringkat kelima dan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada di tingkat pertama. Jika dilihat dari tingkat kemiskinannya Jawa Tengah salah satu provinsi di Jawa yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sisi rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah berada pada pola hubungan partisipatif, yang artinya mendekati mampu menjalankan otonomi daerah. Namun jika dilihat dari tingkat kemiskinannya Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat kesejahteraannya rendah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2004:128). Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Tabel 1
Rasio Kemandirian Fiskal
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 (dalam persen)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Banjarnegara	7,12	5,90	9,03	7,35	6,59
2	Kab. Banyumas	11,11	9,87	6,99	13,61	12,13
3	Kab. Batang	6,16	7,41	7,24	7,04	9,15
4	Kab. Blora	6,46	6,89	6,88	5,82	6,65
5	Kab. Boyolali	9,53	8,14	8,81	9,42	8,77
6	Kab. Brebes	7,81	7,78	8,49	6,44	5,95
7	Kab. Cilacap	8,02	8,83	10,06	11,23	10,56
8	Kab. Demak	5,69	6,42	6,79	5,45	6,96
9	Kab. Grobogan	7,05	8,29	6,01	8,30	7,48
10	Kab. Jepara	7,85	9,33	9,97	9,39	8,86
11	Kab. Karanganyar	8,87	8,36	9,09	9,09	9,97
12	Kab. Kebumen	7,99	7,42	7,16	6,01	5,76
13	Kab. Kendal	11,66	9,99	9,72	9,57	8,21
14	Kab. Klaten	5,91	5,09	4,73	5,18	5,30
15	Kab. Kudus	8,27	7,79	8,74	11,23	12,37
16	Kab. Magelang	9,15	9,35	8,64	7,97	8,11
17	Kab. Pati	10,05	9,10	9,73	11,23	10,94
18	Kab. Pekalongan	7,60	7,45	8,68	9,01	8,89
19	Kab. Pemalang	8,14	8,82	9,87	7,40	6,70
20	Kab. Purbalingga	8,90	9,33	11,14	6,12	9,95
21	Kab. Purworejo	6,95	6,17	8,09	8,68	7,87
22	Kab. Rembang	8,18	8,83	9,82	9,64	8,46
23	Kab. Semarang	10,79	11,09	11,79	11,83	12,11
24	Kab. Sragen	8,80	7,04	9,11	9,02	8,64
25	Kab. Sukoharjo	6,90	6,09	6,66	8,08	9,47
26	Kab. Tegal	8,92	7,38	8,20	7,72	7,48
27	Kab. Temanggung	6,87	6,55	7,39	8,17	7,69
28	Kab. Wonogiri	6,93	6,43	6,93	6,62	6,61
29	Kab. Wonosobo	6,73	5,58	6,89	7,27	6,88
30	Kota Magelang	10,99	11,23	12,54	14,82	12,57
31	Kota Pekalongan	7,77	8,47	8,10	11,38	12,42
32	Kota Salatiga	11,96	11,56	13,70	12,69	12,68
33	Kota Semarang	22,00	20,03	19,90	20,20	25,44
34	Kota Surakarta	14,64	13,71	13,99	13,28	17,59
35	Kota Tegal	18,15	17,99	21,37	21,98	21,41

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2012 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 keadaan rasio kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 kurang dari 25%. Kota Semarang yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan rasio kemandirian fiskal. Namun tahun 2010 dan tahun 2011 Kota Semarang mampu meningkatkan rasio kemandirian fiskal mencapai 25,44% di tahun 2011. Menunjukkan

bahwa 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 memiliki rasio kemandirian fiskal yang mengalami fluktuatif dan kurang dari atau sama dengan 25%. Hal itu menunjukkan bahwa 35 kabupaten/kota memiliki pola hubungan yang rendah sekali. Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah masih adanya peran pusat yang sangat dominan. Sehingga keseluruhan kabupaten/kota belum dapat dikatakan mandiri dalam sektor keuangannya.

Desentralisasi fiskal memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pelimpahan wewenang fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tersebut merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi (Oates dalam Adi, 2007:1-10). Pemerintah pusat melakukan campur tangan terhadap daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di daerah. Alasan tersebut merupakan prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2002:1-14).

Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kelima di pulau Jawa yaitu sebesar 6,01%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 5,59%, tahun 2008 sebesar 5,61%, tahun 2009 sebesar 5,14%, tahun 2010 sebesar 5,84%, dan tahun 2011 sebesar 6,01%. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah rendah, meskipun selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonominya meningkat terus dan hanya mengalami penurunan di tahun 2009. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2011 adalah Kabupaten Klaten yaitu sebesar 1,96%. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 adalah Kabupaten Sragen sebesar 6,53% dan mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya. Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah justru berada diperingkat tertinggi kedua laju pertumbuhan ekonomi setelah Kabupaten Sragen (BPS, 2012).

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi upaya penurunan kemiskinan melalui berbagai cara yang berbeda di masing-masing negara baik melalui jalur langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan kemiskinan didefinisikan sebagai penurunan kualitas berbagai aspek kehidupan, baik kebutuhan dasar, pendapatan rumah tangga maupun keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan merupakan dampak kebijakan desentralisasi yang cukup penting.

Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan fluktuatif. Pada tahun 2011 kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama di pulau Jawa sebesar 16,21%. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 20,43%, tahun 2008 sebesar 22,19%, tahun 2009 sebesar 18,99%, tahun 2010 sebesar 16,11%, dan tahun 2011 sebesar 16,21%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih sangat tinggi. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh Kota Semarang sebesar 5,68% dan mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh Kabupaten Wonosobo. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Kabupaten Wonosobo mengalami fluktuasi besarnya tingkat kemiskinan hingga akhirnya tahun 2011 memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 24,21% (BPS, 2012).

Tabel 2
Ketersediaan Infrastruktur Sekolah
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011 (unit bangunan)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Cilacap	1.076	1.082	1.070	1.049	1.013
2	Kab. Banyumas	940	901	890	900	900
3	Kab. Purbalingga	511	542	546	534	536
4	Kab. Banjarnegara	708	717	722	731	730
5	Kab. Kebumen	899	888	875	873	876
6	Kab. Purworejo	592	587	582	597	591
7	Kab. Wonosobo	557	563	561	567	563
8	Kab. Magelang	632	635	635	637	637
9	Kab. Boyolali	646	663	643	663	663
10	Kab. Klaten	851	860	858	853	853
11	Kab. Sukoharjo	513	518	521	516	513
12	Kab. Wonogiri	893	862	795	895	890
13	Kab. Karanganyar	542	551	546	546	546
14	Kab. Sragen	631	638	610	631	633
15	Kab. Grobogan	896	906	793	922	924
16	Kab. Blora	693	689	691	694	693
17	Kab. Rembang	407	422	422	423	423
18	Kab. Pati	738	743	737	750	725
19	Kab. Kudus	503	501	502	494	493
20	Kab. Jepara	633	640	242	643	645
21	Kab. Demak	606	611	608	610	597
22	Kab. Semarang	561	574	571	569	569
23	Kab. Temanggung	473	481	498	478	472
24	Kab. Kendal	613	626	625	629	635
25	Kab. Batang	528	530	523	524	524
26	Kab. Pekalongan	570	599	597	599	601
27	Kab. Pemalang	789	798	759	844	865
28	Kab. Tegal	806	810	857	857	857
29	Kab. Brebes	953	971	980	972	971
30	Kota Magelang	79	84	84	84	89
31	Kota Surakarta	237	236	239	239	239
32	Kota Salatiga	97	99	101	101	100
33	Kota Semarang	545	533	535	533	424
34	Kota Pekalongan	123	125	125	124	124
35	Kota Tegal	147	153	143	168	155
Provinsi Jawa Tengah		20.988	21.138	20.486	21.229	21.049

Sumber: BPS Jawa Tengah (2012)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah unit bangunan infrastruktur sekolah dari TK, SD, SMP, SMA negeri di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Jumlah bangunan sekolah pada tahun 2011 dengan jumlah paling sedikit adalah Kota Magelang yaitu hanya memiliki jumlah bangunan sebanyak 89 unit bangunan sekolah. Jumlah

bangunan sekolah paling banyak pada tahun 2011 adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 1.013 unit bangunan sekolah. Banyak ataupun sedikitnya jumlah unit bangunan infrastruktur sekolah ditentukan oleh kebutuhan masyarakat daerah tersebut terhadap sarana infrastruktur yang tersedia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama desentralisasi. Desentralisasi fiskal adalah pendeklegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*) (Prawirosetoto dalam Dorani, 2011:42).

Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Konsep Kemandirian Fiskal

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim,2004:128). Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad (2004: 13) diartikan sebagai kenaikan Produk

Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Prasetyo (2009:237) istilah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan oleh suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Arsyad,2004:18):

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana g adalah pertumbuhan ekonomi (dalam Persen), Y_t adalah produk domestik regional bruto (PDRB) tahun sekarang (dalam Rupiah), dan Y_{t-1} adalah produk domestik regional bruto (PDRB) tahun sebelumnya (dalam Rupiah).

Konsep Kemiskinan

BPS (2008) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar untuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Seseorang dikatakan miskin apabila kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori perkapita per hari atau setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di perdesaan dan 480 kg/kapita/tahun di perkotaan dan kebutuhan non makanan minimum yang dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. BPS setiap tahun menetapkan besarnya garis kemiskinan berdasarkan hasil Susenas modul konsumsi dengan besaran yang berbeda-beda untuk tiap provinsi tergantung besarnya biaya hidup minimum masing-masing provinsi.

Keterkaitan Infrastruktur Publik dengan Kemandirian Fiskal

Secara intuitif desentralisasi fiskal akan mendorong efisiensi ekonomi terutama di sektor publik yang pada akhirnya akan menimbulkan dinamik efek pada pertumbuhan ekonomi daerah. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah (*sub-national government*) daripada oleh pemerintah pusat karena mereka akan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi fiskal akan mendorong pengeluaran publik dalam rangka penyediaan jasa publik dan infrastruktur oleh pemerintah daerah dengan biaya yang lebih murah, hasil yang lebih banyak, dan kualitas yang lebih baik. Jadi, dengan anggaran publik yang tertentu akan menghasilkan jasa publik dan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik (Khusaini,2006:46).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya data tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Data yang diteliti meliputi data APDB berupa realisasi total pendapatan daerah dan realisasi pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah unit bangunan sekolah, dan tingkat kemiskinan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Data *time series* periode tahun 2007-2011 sedangkan data *cross section* adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2006:130). Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif maka

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:321). Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Definisi Variabel

Kemandirian Fiskal (Y) adalah kemampuan daerah membiayai segala urusan rumah tangganya baik pemerintah maupun pembangunan dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau PAD. Mengukur kemandirian fiskal yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Satuan dalam kemandirian fiskal merupakan rasio yang dinyatakan dalam satuan persen.

Tingkat Kemiskinan (X₁) adalah besarnya persentase kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang dinyatakan dalam satuan persen. Ketersediaan Infrastruktur Sekolah (X₂) adalah fasilitas berupa bangunan sekolah dari TK sampai SMA baik yang negeri dan swasta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketersediaan infrastruktur sekolah dalam satuan unit bangunan. Pertumbuhan Ekonomi (X₃) adalah pertumbuhan output atau pertambahan pendapatan daerah dalam satu periode tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam satuan persen.

Analisis Panel Data

Menurut Gujarati (2010:237), data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan data yang

dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Menurut Ajija, dkk (2011:51) ada tiga metode yang digunakan untuk mengestimasi data panel yaitu: Model *Pooled Least Square (Common Effect)*, model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), pada metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section*. Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*), dalam model efek acak parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Karena hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen *error* (*error component model*).

Spesifikasi Model Regresi

Secara ekonometrika hubungan antara tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ini :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	= Kemandirian Fiskal (persen)
X_1	= Tingkat Kemiskinan (persen)
X_2	= Ketersediaan Infrastruktur Sekolah (unit bangunan)
X_3	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
e	= Residual
t	= <i>Time series</i>
i	= <i>Cross section</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penaksiran Model

Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio, pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-Section Chi-Square* sebesar 0,0000 dan signifikan terhadap alpha 5% sehingga dapat diputuskan bahwa model yang dipilih menggunakan *fixed effect*.

Correlated Fixed Effect – Hausman Test, pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0,0080 dan signifikan terhadap alpha 5% sehingga dapat diputuskan model yang dipilih menggunakan *fixed effect*.

Model regresi pengaruh tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan model *fixed effect* dan metode GLS, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel penelitian dengan persamaan sebagai berikut.

Y_{it}	=	$\alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$
Y_{it}	=	10,86188 – 0,070598 X_{1it} – 0,002463 X_{2it} + 0,254675 X_{3it}
Std Error	(1,291612)	(0,028380)
(0,001813)	(0,094017)	
Sig	(0,0000)	(0,0141)
(0,1764)	(0,0076)	

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar 0,07 terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,07%.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinan juga berkaitan erat dengan kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan daerah tersebut dan besarnya bantuan dari pusat untuk masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal suatu daerah maka daerah tersebut dikatakan mampu menjalankan desentralisasi fiskal dan dikatakan semakin mandiri dalam mengelola berbagai sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Jika rasio kemandirian fiskal daerah tersebut menunjukkan mandiri, maka daerah tersebut juga mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat mempengaruhi target-target pembangunan nasional, antara lain penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing dan pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder.

Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Sekolah Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel ketersediaan infrastruktur sekolah tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Ketersediaan infrastruktur sekolah tidak berpengaruh secara nyata terhadap kemandirian fiskal, hal ini dikarenakan ketersediaan infrastruktur dalam bentuk bangunan sekolah ditentukan oleh anggaran pembelanjaan infrastruktur bidang pendidikan. Besarnya anggaran pembelanjaan infrastruktur bidang pendidikan ditentukan oleh pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah yang merupakan komponen dari kemandirian fiskal. Ketersediaan infrastruktur sekolah tidak dapat dipisahkan dari upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur sekolah tersebut dapat memperlancar kegiatan dan akses masyarakat terhadap akses fasilitas-fasilitas publik. Sehingga pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan

infrastruktur sekolah yang ada di daerah tersebut. Secara tidak langsung, ketersediaan infrastruktur sekolah dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,27 terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,25%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak juga bagi kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisien suatu daerah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini karena kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan rasio kemandirian fiskal, meningkatkan belanja untuk infrastruktur, dan dapat juga meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dalam jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan infrastruktur sekolah tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur sekolah, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2011.

Saran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disarankan memberikan perhatian kepada kabupaten/kota yang masih memiliki rasio kemandirian fiskal antara 0%-25%. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal dilakukan dengan cara menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD dan TPD sebagai komponen dari kemandirian fiskal harus diiringi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan nantinya akan tercipta ketersediaan infrastruktur sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur sekolah, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2011.

Saran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disarankan memberikan perhatian kepada kabupaten/kota yang masih memiliki rasio kemandirian fiskal antara 0%-25%. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal dilakukan dengan cara menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD dan TPD sebagai komponen dari kemandirian fiskal harus diiringi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan nantinya akan tercipta ketersediaan infrastruktur sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota se Jawa – Bali)*. The 1st Accounting Conference 7 – 9 November 2007 Jakarta. Hal: 1 – 10.

Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2008. *Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

_____. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

_____. 2012. *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Bird, Richard dan Edgard R. Rodriguez. 1999. *Decentralization And Poverty Alleviation. International Experience And The Case Of The Philippines*. Jurnal *Public Administration And Development, Public Admin. Dev.* 19. Hal: 299 – 319.

Dorani, Ahmad. 2011. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Gujarati, D,N. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal, dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Artikel Th. 1 – No. 4 – Juni 2002.

McKay, Andrew. 2002. *Assesing the Impact of Fiscal Policy on Poverty*. Dalam Jurnal *Discussion Paper No. 2002/43*. United Nations University World Institute for

Development Economics Research. Hal:
1 – 18.

Prasetyo, P.Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.

